

ANALISIS PENGARUH *INVESTABLE ASSETS* TERHADAP PENGHASILAN DALAM RANGKA PENGGALIAN POTENSI PAJAK *HIGH WEALTH INDIVIDUAL* DI INDONESIA

Alamanda

Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia. Email: alamanda.djp@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to provide a method that can be used as a guide or basis in determining the target analysis of the high wealth individual (HWI) taxpayers. Personal income tax revenue in Indonesia is still relatively minimum. Moreover, the tax gap for this sector is also high. Therefore, this paper tries contributing to the discussion by using a panel data regression of 2.850 HWI's annual tax returns from 2017 to 2018 to examine the effect of investable assets on HWI's income in Indonesia. The empirical evidence suggests that investable assets are significantly and positively correlated with HWI's income. The result shows that every 100% increase in investable assets will raise HWI's income as much as 5,3%. This result could be used as consideration to put HWI taxpayers who have a ratio of 'increase in income' to 'increase in investable assets' less than 5,3% on the target analysis lists, so that the extra effort to optimize tax revenue from HWI sector can be more focused, efficient, and on target.

Keywords: high wealth individual, investable asset, income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan metode yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam menentukan sasaran penggalian potensi pajak *high wealth individual* (HWI). Penerimaan pajak dari sektor Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia saat ini masih belum optimal. *Tax gap* untuk sektor ini pun masih relatif besar. Penelitian ini mencoba berkontribusi dengan menggunakan regresi panel data dari 2.850 surat pemberitahuan tahunan HWI periode 2017 sampai dengan 2018 untuk menguji pengaruh *investable assets* terhadap kenaikan penghasilan HWI di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa *investable assets*

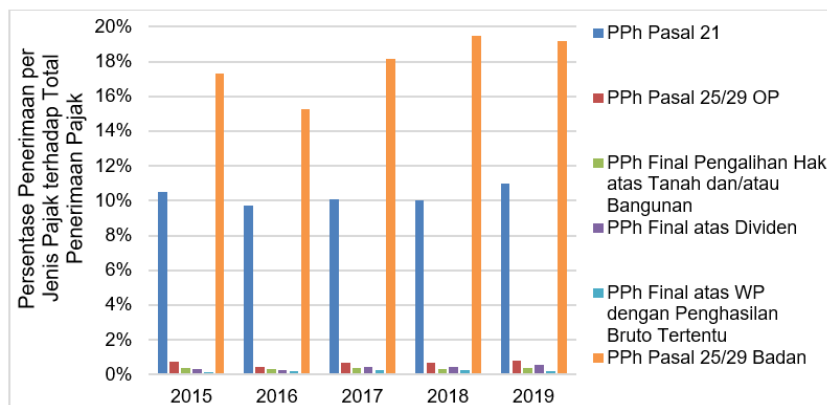
secara statistik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghasilan HWI. Hasil menunjukkan setiap 100% kenaikan pada *investible assets* akan meningkatkan penghasilan sebesar 5,3%. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menempatkan HWI yang memiliki rasio 'kenaikan penghasilan' dibandingkan dengan 'kenaikan *investable assets*-nya' lebih kecil dari 5,3% ke dalam daftar sasaran analisis, sehingga upaya penggalan potensi pajak sektor HWI dapat lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran.

Kata kunci: high wealth individual, investable asset, penghasilan

1. PENDAHULUAN

Struktur penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih menjadikan Wajib Pajak Badan sebagai tumpuan utama penerimaan negara. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya mekanisme pengumpulan penerimaan perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan Gambar 1, penerimaan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang berasal dari PPh Pasal 25/29 OP dan PPh Pasal 21 pada tahun 2019 berkisar 11,79% dari total penerimaan pajak nasional (Direktorat Jenderal Pajak,

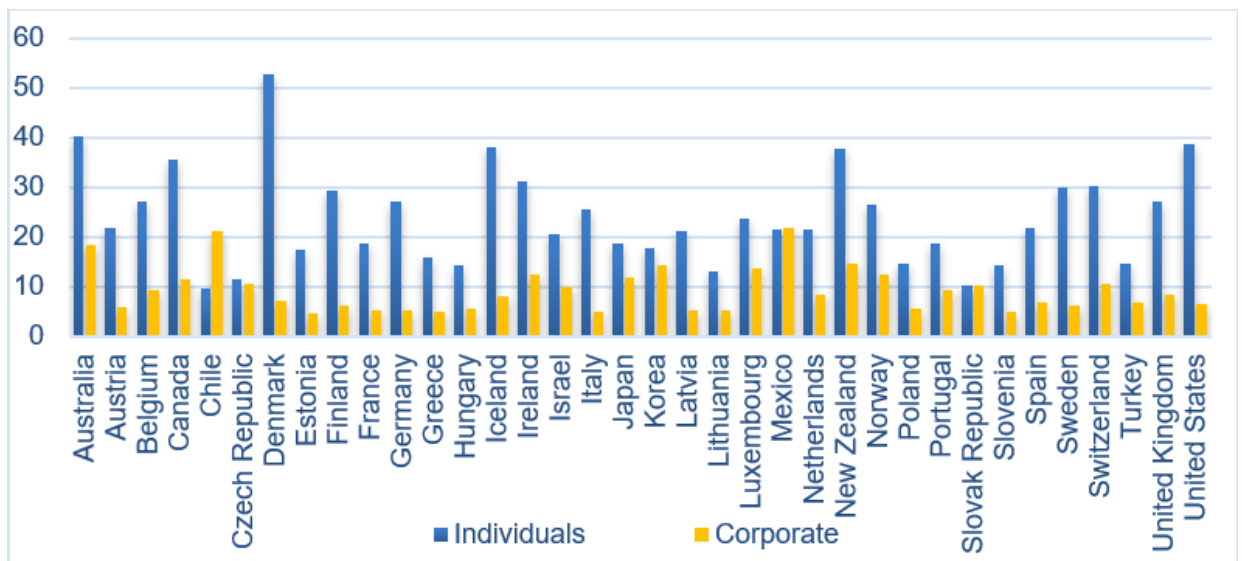
2020). Sementara itu, rata-rata porsi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP dalam lima tahun terakhir hanya berkisar 0,68% dari total penerimaan nasional. Angka ini belum termasuk penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain penerimaan PPh OP yang masih relatif rendah, *tax gap* PPh di Indonesia juga masih terbilang tinggi, yaitu sebesar 41,74%. *Tax gap* untuk PPh OP non-karyawan bahkan mencapai sekitar 80%.



Gambar 1 Perbandingan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan
 Sumber: Dashboard Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Kondisi ini bertolak belakang jika dibandingkan dengan negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) di mana penerimaan pajak yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi lebih besar daripada Wajib Pajak Badan. Berdasarkan data *Revenue Statistics OECD* (2019), hanya satu negara (Chili) dari 34 negara OECD yang memiliki porsi penerimaan Wajib Pajak Badan lebih besar daripada Wajib Pajak Orang Pribadi (lihat Gambar 2). Negara OECD lainnya memiliki porsi penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selalu lebih

besar dibandingkan dengan porsi yang dimiliki Wajib Pajak Badan, contohnya Amerika Serikat (38,7% berbanding 6,5%), Inggris (27,2% berbanding 8,5%), dan Belanda (21,6% berbanding 8,5%). Dengan perbandingan porsi penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Pasal 25/29 OP dan PPh Pasal 21) dan Wajib Pajak Badan (PPh Pasal 25/29 badan) sebesar 11,79% berbanding 19,19%¹, maka dapat diperkirakan bahwa masih terdapat potensi besar yang masih dapat digali dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.



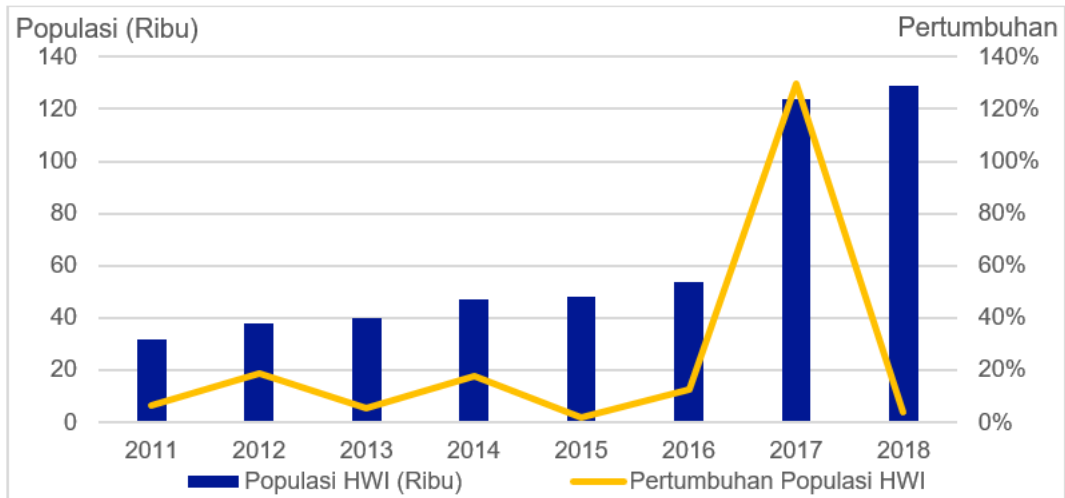
Gambar 2 Perbandingan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di Negara OECD

Sumber : *Revenue Statistics 2019: Tax Revenue Trends in the OECD*

¹ Terdapat penerimaan lain dalam bentuk PPh final yang sulit dipisahkan antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Di sisi lain, data dari Asia Pacific *Wealth Report* (Capgemini, 2017) menunjukkan adanya peningkatan populasi di Indonesia atas *high wealth individual* (HWI), individu dengan kekayaan lebih dari

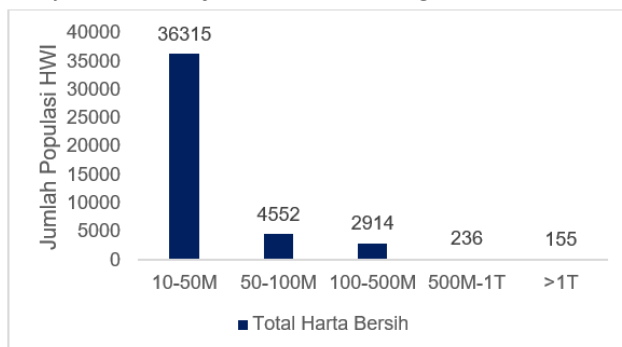
USD 1 Juta, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2016 sampai dengan 2017, yaitu sebesar 129,63% (lihat Gambar 3).



Gambar 3 Pertumbuhan Populasi HWI di Indonesia
 Sumber: Asia Pacific Wealth Report (2011 s.d. 2018)

Laporan sesudah program amnesti pajak juga mengindikasikan besarnya populasi HWI di Indonesia. Gambar 4 menunjukkan ada 44.172 HWI dengan total kekayaan bersih di atas Rp 10 miliar, di mana 155 HWI di antaranya memiliki total harta bersih lebih dari Rp 1 triliun. Kenaikan populasi HWI seharusnya menunjukkan

makin banyaknya penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dan berkaitan langsung dengan kenaikan nilai pajak yang seharusnya dibayar. Namun demikian, tingginya pertumbuhan populasi HWI ini tidak diiringi dengan kenaikan nilai penerimaan pajak dari sektor Wajib Pajak Orang Pribadi.

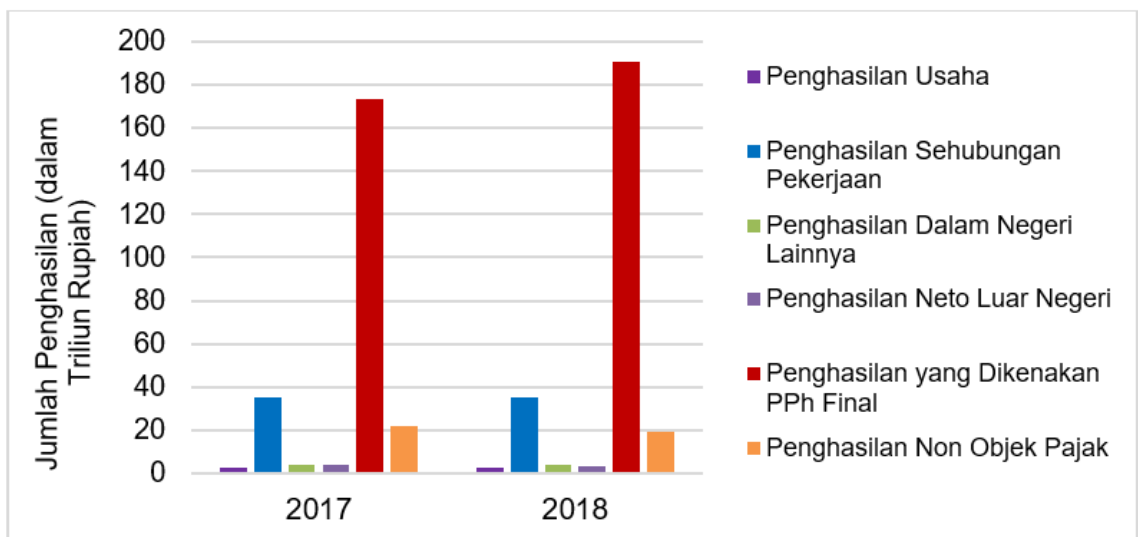


Gambar 4 Populasi HWI berdasarkan Laporan Pasca Amnesti Pajak
 Sumber: Laporan Pasca Amnesti Pajak, Direktorat Jenderal Pajak

HWI memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya, yaitu sebagian besar penghasilan yang diperoleh HWI berasal dari *passive income*. Penelitian dari *Tax Policy Centre* (Frank, 2015) mengungkapkan bahwa 75% penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Amerika Serikat dengan penghasilan di bawah USD 500.000 berasal dari gaji dan/atau upah. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan lebih dari USD 10 juta, gaji dan/atau upah hanya berkontribusi sebesar 15% dari total penghasilan. Penghasilan sesungguhnya dari kategori Wajib Pajak Orang Pribadi ini berasal dari *capital gain* (50%), bunga dan dividen (15-20%), serta penghasilan dari perusahaan pribadi (25%).

Sama halnya dengan HWI di Amerika Serikat, *passive income*, yang dikenakan

pajak penghasilan final, juga mendominasi sumber penghasilan HWI di Indonesia. Gambar 5 menunjukkan komposisi jenis penghasilan dalam surat pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dari sekitar 22.700 Wajib Pajak HWI dengan kriteria memiliki penghasilan lebih dari Rp 3 miliar dan total harta bersih melebihi Rp 10 miliar pada 2017 dan 2018. Gambar 5 juga memperlihatkan bahwa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final mendominasi sebagian besar penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak HWI, yaitu sebesar 72% pada tahun 2017 dan 75% pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber penghasilan Wajib Pajak HWI sebagian besar berasal dari *passive income*, yaitu *capital gain*, dividen, bunga, dan sewa.



Gambar 5 Komposisi Jenis Penghasilan Wajib Pajak HWI di Indonesia

Sumber: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2017 dan 2018)

Dengan banyaknya penghasilan HWI yang berasal dari kepemilikan harta, maka kenaikan nilai kepemilikan harta seharusnya dapat menggambarkan peningkatan penghasilan yang diperoleh oleh seseorang. Dengan menggunakan data kepemilikan harta dan data penghasilan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait pengaruh kenaikan nilai *investable assets* terhadap penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak HWI. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan daftar sasaran analisis sektor Wajib Pajak HWI dan prominen. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan rasio kenaikan penghasilan dibanding kenaikan *investable assets*-nya lebih rendah daripada hasil estimasi dalam penelitian ini dapat menjadi prioritas untuk dilakukan analisis.

2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian tentang pengaruh harta terhadap penghasilan telah dilakukan sejak lama. Penelitian tersebut umumnya melihat pengaruh harta terhadap penghasilan dari sisi perusahaan, bukan individu. Tingkat pengembalian dari harta di perusahaan dikenal sebagai *Return on Assets* (ROA) dan menjadi salah satu indikator profitabilitas perusahaan.

Perusahaan pada umumnya menggunakan harta untuk kegiatan produksi maupun investasi. OP menggunakan harta tidak hanya untuk

memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai instrumen investasi. Instrumen investasi inilah yang dapat memberikan tambahan penghasilan dari harta yang dimiliki. My Money Wizard (2018) memaparkan beberapa cara penggunaan harta untuk menghasilkan tambahan pendapatan, antara lain:

- a. *saving accounts* (tabungan);
- b. *certificate of deposits* (deposito);
- c. *interest paying bonds* (obligasi);
- d. *dividend paying stocks* (saham);
- e. *peer to peer lending* (pinjaman usaha);
- f. *single family rental houses, multi-family rental properties, tycoon status – apartment buildings, slumlord status – trailer parks, short term rentals, vacation rentals, real estate investment trusts, farmland, timberland* (sewa properti); dan
- g. *royalties* (royalti).

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir setiap jenis harta berpotensi untuk menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Paparan tersebut di atas didukung oleh penelitian dari Mayoux (2001) yang menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan harta dengan peningkatan penghasilan seseorang. Penelitian lainnya dari Winters et al. (2009) juga menunjukkan adanya keterkaitan antara peningkatan kepemilikan tanah dengan kenaikan produktivitas pertanian dan kesejahteraan. Sementara itu, Davis dan Willen (2000) menyatakan bahwa pengembalian sekelompok aset cenderung lebih besar dibandingkan dengan penghasilan dari satu jenis aset saja.

Penelitian oleh Nakagawa dan Shimizu (2000) menyimpulkan rendahnya tingkat pengembalian dari kepemilikan aset di Jepang karena karakter masyarakat Jepang yang lebih mengutamakan "safety" dan "liquidity" dibandingkan "profitability". Kepemilikan rumah menjadi salah satu faktor yang menentukan pendapatan yang diperoleh dari aset berdasarkan riset yang dilakukan oleh Flavin dan Yamashita (2002). Selanjutnya, Campbell (2006) menunjukkan adanya pengaruh tingkat kekayaan dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengembalian yang diterima dari aset.

Beberapa penelitian di atas telah membuktikan terdapatnya hubungan positif antara kepemilikan aset dengan kenaikan penghasilan. Namun demikian, belum terdapat penelitian mengenai berapa besarnya tingkat pengembalian dari investasi harta yang dilakukan oleh orang pribadi di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat terdapatnya perbedaan karakter dalam berinvestasi oleh masyarakat di masing-masing negara, sebagaimana telah dicontohkan Nakagawa dan Shimizu (2000). Selain itu, estimasi tingkat pengembalian rata-rata atas investasi harta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi institusi perpajakan dalam menetapkan sasaran analisis dalam rangka penggalan potensi pajak atas penghasilan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Sub bagian ini berkaitan dengan metodologi dan identifikasi strategi untuk menjawab pertanyaan penelitian dan terdiri dari penjelasan sumber data, model ekonometri, serta deskripsi masing-masing variabel yang terdapat di dalam model.

3.1 Sumber Data

Dengan menggunakan kriteria *The World Wealth Report 2019*, *The U.S. Securities and Exchange Commission*, dan *Wealth-X High Net Worth Handbook 2019* sebagai acuan, maka analisis ini mendefinisikan HWI di Indonesia sebagai individu atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki:

- a. Harta bersih di atas Rp10 miliar dan total penghasilan di atas Rp 3 miliar per tahun dalam tiga tahun terakhir; atau
- b. Termasuk ke dalam rilis daftar orang kaya oleh media terpercaya; atau
- c. Pemilik grup bisnis.

Penelitian ini menggunakan set data panel dari 2.850 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi HWI pada periode 2017 dan 2018. Data panel digunakan dalam analisis ini dikarenakan tiga hal; (i) data panel memberikan variasi data yang lebih banyak dan *degree of freedom* yang lebih tinggi; (ii) data panel dapat digunakan untuk melakukan analisis yang lebih kompleks; dan (iii) data panel menyederhanakan penghitungan dan penarikan kesimpulan secara statistik karena menyediakan data baik secara *time-series* maupun *cross-section* (Hsiao, 2005).

Sumber data yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel pendapatan (*income*) dan *investable assets* diperoleh dari SPT
- b. Variabel pengalaman bekerja (*experience*) dihitung dari saat wajib pajak tersebut terdaftar memiliki Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan asumsi bahwa kewajiban memiliki NPWP muncul saat wajib pajak mulai bekerja dan memperoleh penghasilan; dan
- c. Variabel status, jumlah tanggungan, dan lokasi wajib pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh dan basis data wajib pajak yang terdapat dalam sistem informasi perpajakan.

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak HWI;

3.2 Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen (jumlah penghasilan), variabel independen (*investable assets*), dan variabel kontrol (pengalaman bekerja, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan lokasi Wajib Pajak HWI). Tabel 1 menjelaskan deskripsi masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis.

Tabel 1 Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi
Penghasilan	Jumlah penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak HWI di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, tidak termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Data atas penghasilan HWI dari SPT Tahunan PPh diperoleh dengan menggunakan <i>Consolidated Report (CoRo)</i> .
<i>Investable Assets</i>	Jumlah harta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak HWI di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang meliputi kas dan setara kas, harta tidak bergerak, dan investasi. Jumlah harta yang digunakan adalah data harta pada tahun t-1. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan efek <i>reverse causality</i> .
Pengalaman Bekerja	Lamanya Wajib Pajak HWI bekerja. Proksi yang digunakan untuk pengalaman bekerja adalah jumlah tahun dihitung sejak saat wajib pajak tersebut mendaftar NPWP sampai dengan 2018.
Status Perkawinan	Status perkawinan yang digunakan adalah status perkawinan HWI berdasarkan basis data Wajib Pajak yang terdapat dalam sistem informasi perpajakan. Status perkawinan menggunakan variabel <i>dummy</i> , di mana jika Wajib Pajak HWI berstatus kawin maka akan diberi nilai 1 (satu), sedangkan jika Wajib Pajak HWI berstatus tidak kawin maka akan diberikan nilai 0 (nol).
Jumlah Tanggungan	Proksi yang digunakan untuk variabel ini adalah jumlah orang yang menjadi tanggungan Wajib Pajak HWI sesuai dengan basis data dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
Lokasi	Variabel ini menggambarkan letak geografis Wajib Pajak HWI yang terbagi ke dalam lima kategori pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, serta pulau lainnya. Kelompok Pulau Jawa dan Bali digunakan sebagai basis atau level referensi.

3.2 Model Regresi

Persamaan model dengan menggunakan pendekatan data panel digunakan untuk

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{i,t-1} + \beta_2 Exp_{i,t} + \beta_3 S_{i,t} + \beta_4 JT_{i,t} + \beta_5 Loc + \varepsilon_{i,t}$$

Di mana

$Y_{i,t}$ = Jumlah penghasilan Wajib Pajak HWI i di SPT pada tahun t , kecuali penghasilan sehubungan pekerjaan (Rupiah)

$X_{i,t-1}$ = *Investable-assets* Wajib Pajak HWI i pada tahun $t-1$. Harta pada tahun $t-1$ digunakan untuk menghilangkan efek *reverse causality* (Rupiah)

$Exp_{i,t}$ = Lama pengalaman bekerja Wajib Pajak HWI (Tahun)

$S_{i,t}$ = Status Perkawinan (0=Tidak Kawin; 1=Kawin)

$JT_{i,t}$ = Jumlah Tanggungan (Orang)

Loc = Lokasi Wajib Pajak HWI (0=Jawa dan Bali (*as level* referensi); 1=Sumatera; 2=Kalimantan; 3=Sulawesi dan Maluku; 4=Pulau Lainnya)

$\varepsilon_{i,t}$ = *Error Term*

Periode lama bekerja menunjukkan tingkat pengalaman yang berpengaruh terhadap besarnya penghasilan seseorang (Sahn & Alderman, 1988). Variabel kontrol lain yang digunakan adalah status perkawinan. Berdasarkan beberapa

menganalisis pengaruh *investable assets* terhadap penghasilan Wajib Pajak HWI. Analisis ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

penelitian, status perkawinan seseorang memiliki pengaruh terhadap kinerja, promosi, dan penghasilan (Dougherty, 2006; Korenmen & Neumark, 1991; Madalozzo, 2008). Selanjutnya, penghasilan seseorang juga dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran keluarga (Havrilová, 2016; Lindsey & Shlonsky, 2008; Okoshi et al., 2016). Jumlah orang yang menjadi tanggungan Wajib Pajak HWI merupakan proksi yang digunakan untuk menggambarkan besarnya ukuran keluarga. Variabel kontrol terakhir adalah lokasi Wajib Pajak HWI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gallup *et al.* (1999), lokasi, iklim, dan letak geografis akan memengaruhi pertumbuhan dan tingkat penghasilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 menggambarkan sebaran jumlah sampel berdasarkan letak geografis dan tahun pajak pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria HWI sebagaimana dijelaskan dalam subbagian 3.1, yaitu Wajib

Pajak Orang Pribadi yang memiliki harta bersih di atas Rp10 Miliar dan total penghasilan di atas Rp3 Miliar per tahun data sampel berasal dari SPT Tahunan Orang Pribadi yang diperoleh melalui *Consolidated Report* (CoRo).

Berdasarkan Tabel 2, sebaran Wajib Pajak HWI paling banyak berdomisili di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebesar 54,32%,

dalam tiga tahun terakhir, atau termasuk ke dalam rilis daftar orang kaya oleh media terpercaya, atau pemilik grup bisnis. Sumber disusul oleh Jawa Timur (14,74%) dan Jawa Barat (8,11%). Jumlah pengambilan 2.850 sampel data berdasarkan tahun pajak terbagi hampir secara rata, yaitu sebanyak 1.428 sampel (2017) dan 1.422 sampel (2018).

Tabel 2 Sebaran HWI berdasarkan Letak Geografis dan Tahun

Sumber: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2017 dan 2018)

No.	Propinsi	Jumlah HWI		Jumlah Wajib Pajak HWI	% Total HWI
		2017	2018		
1	Bali	13	13	26	0,91%
2	Banten	15	15	30	1,05%
3	D.I. Yogyakarta	11	11	22	0,77%
4	DKI Jakarta	775	773	1548	54,32%
5	Gorontalo	1	1	2	0,07%
6	Jambi	6	6	12	0,42%
7	Jawa Barat	116	115	231	8,11%
8	Jawa Tengah	94	92	186	6,53%
9	Jawa Timur	210	210	420	14,74%
10	Kalimantan Barat	12	12	24	0,84%
11	Kalimantan Selatan	7	7	14	0,49%
12	Kalimantan Tengah	2	2	4	0,14%
13	Kalimantan Timur	14	14	28	0,98%
14	Kalimantan Utara	3	3	6	0,21%
15	Kepulauan Bangka Belitung	5	5	10	0,35%
16	Kepulauan Riau	4	4	8	0,28%
17	Lampung	14	14	28	0,98%
18	Maluku	4	4	8	0,28%
19	Maluku Utara	2	2	4	0,14%
20	Nusa Tenggara Barat	2	2	4	0,14%
21	Nusa Tenggara Timur	1	1	2	0,07%
22	Papua	7	7	14	0,49%
23	Papua Barat	2	2	4	0,14%
24	Riau	9	9	18	0,63%
25	Sulawesi Selatan	15	15	30	1,05%
26	Sulawesi Tengah	3	3	6	0,21%
27	Sulawesi Tenggara	3	3	6	0,21%
28	Sulawesi Utara	3	3	6	0,21%
29	Sumatera Barat	4	4	8	0,28%
30	Sumatera Selatan	10	10	20	0,70%
31	Sumatera Utara	61	60	121	4,25%
	TOTAL	1428	1422	2850	100,00%

Wajib Pajak HWI kemudian dikelompokkan ke dalam variabel *dummy* berdasarkan lima pulau besar Indonesia. Pengelompokan ini diperlukan karena pertumbuhan dan tingkat penghasilan dari investasi harta dipengaruhi oleh lokasi dan

letak geografis (Gallup et al., 1999). Tabel 3 menunjukkan bahwa Jawa dan Bali merupakan kelompok pulau yang paling banyak memiliki jumlah Wajib Pajak HWI, yaitu sebanyak 2.463 HWI atau sekitar 86% dari total sampel.

Tabel 3 Sebaran HWI berdasarkan Kelompok Lima Pulau

Sumber: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2017 dan 2018)

No.	Propinsi	Jumlah HWI		Jumlah Wajib Pajak HWI	% Total HWI
		2017	2018		
1	Jawa dan Bali	1234	1229	2463	86,42%
2	Sumatera	113	112	225	7,89%
3	Kalimantan	38	38	76	2,67%
4	Sulawesi dan Maluku	31	31	62	2,18%
5	Pulau Lainnya	12	12	24	0,84%
	TOTAL	1428	1422	2850	100%

Tabel 4 menggambarkan statistik deskriptif untuk tiap variabel dalam analisis. Berdasarkan Tabel 4, rata-rata penghasilan HWI di Indonesia adalah sebesar Rp 33,3 miliar per tahun dengan rerata kepemilikan *investable assets* sebesar Rp 268 miliar.

Selain itu, populasi HWI di Indonesia secara rata-rata memiliki pengalaman bekerja selama 25 tahun dengan status menikah sebanyak 97,3%. Rata – rata jumlah tanggungan HWI memiliki tanggungan sebanyak 0,349.

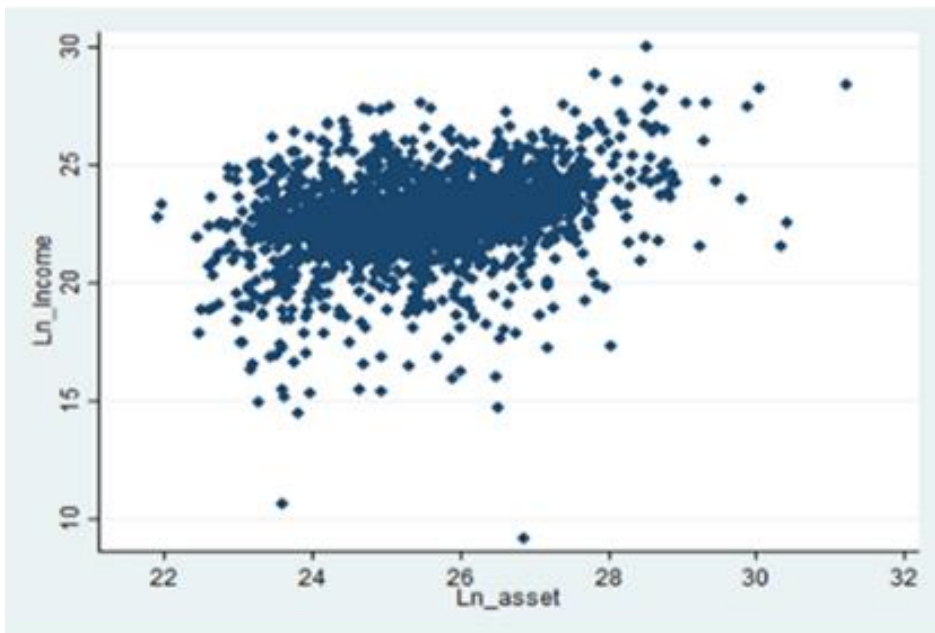
Tabel 4 Statistik Deskriptif

Sumber: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2017 dan 2018)

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Penghasilan (dalam Miliar Rp)	2850	33.3	238	0	10,700
<i>Investable Assets</i> (dalam Miliar Rp)	2850	268	954	0	36,500
Pengalaman Bekerja (<i>Experience</i>)	2850	25.16	9.95	0	39
Status Perkawinan	2850	0.973	0.162	0	1
Jumlah Tanggungan	2850	0.349	0.774	0	3

Gambar 6 merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara *investable assets* dengan tingkat penghasilan Wajib Pajak HWI. Sumbu X menggambarkan jumlah *investable assets* yang dimiliki HWI, sedangkan sumbu Y menggambarkan besarnya jumlah penghasilan HWI. Gambar 6 menunjukkan

adanya hubungan linier positif antara *investable assets* dengan tingkat penghasilan. Hal ini mengindikasikan peningkatan yang terjadi pada *investable assets* akan diikuti peningkatan pada penghasilan HWI, dan penurunan pada *investable assets* juga akan diikuti dengan penurunan pada tingkat penghasilan HWI.



Gambar 6 Scatter Plot

Sumber: Hasil olahan Stata 14.0 (Direktorat Jenderal Pajak, 2017 dan 2018)

4.2 Tabel Korelasi

Penelitian harus memastikan tidak ada masalah kolinearitas antar variabel di dalam regresi agar estimasi koefisien yang stabil dan tepat dapat dihasilkan. Tabel 5 menyajikan korelasi antara masing-masing variabel di dalam analisis. Koefisien korelasi dapat bervariasi mulai dari -1 (korelasi negatif sempurna) hingga +1 (korelasi positif

sempurna), dan juga nilai 0 (nol) yang menunjukkan tidak adanya korelasi. Penelitian ini menggunakan kategorisasi Evans (1996)² sebagai pedoman untuk menentukan tingkat korelasi antar variabel. Tabel 5 mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar variabel independen yang dapat memengaruhi hasil estimasi.

² Sangat lemah: 0.00-0.19; lemah: 0.20-0.39; sedang: 0.40-0.59; kuat: 0.60-0.79; dan sangat kuat: 0.80-1.00

Tabel 5 Tabel Korelasi
 Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Stata 14.0

	Penghasilan	<i>Investable assets</i>	Pengalaman Kerja	Jumlah Tanggungan
Penghasilan	1.0000			
<i>Investable assets</i>	0.2522	1.0000		
Pengalaman Kerja	-0.0513	-0.1690	1.0000	
Jumlah Tanggungan	0.0400	0.0178	-0.0680	1.0000

4.3 Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil analisis regresi terkait pengaruh *investable assets* terhadap penghasilan Wajib Pajak HWI di Indonesia. Berdasarkan Tabel 6, hasil regresi mengindikasikan bahwa *investable assets* secara statistik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghasilan Wajib Pajak HWI. Setiap 100 persen kenaikan (penurunan) pada *investible assets* akan meningkatkan (menurunkan) penghasilan Wajib Pajak HWI sebesar 5,3 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya di mana kepemilikan harta memiliki hubungan positif dengan tingkat pendapatan seseorang (Campbell, 2006; Winters et al., 2009; Mayoux, 2001). *Investable assets* memiliki potensi untuk menghasilkan *passive income*, baik berupa penghasilan sewa, bunga, *capital gain*, maupun dividen sehingga

semakin tinggi tingkat kepemilikan seseorang atas *investable assets*, maka semakin besar pula potensi *passive income* yang dapat diperolehnya.

Hasil analisis untuk variabel kontrol menunjukkan bahwa pengalaman (*experience*), status perkawinan, dan jumlah tanggungan Wajib Pajak HWI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghasilan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penghasilan Wajib Pajak HWI yang berdomisili di pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Wajib Pajak HWI yang berdomisili di pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, Wajib Pajak HWI yang berdomisili di pulau Kalimantan dan pulau Lainnya cenderung memiliki penghasilan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Wajib Pajak HWI yang berdomisili di pulau Jawa dan Bali.

Tabel 6 Hasil Estimasi Pengaruh *Investable Assets* terhadap Penghasilan
 Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Stata 14.0

Income	Coef.	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Invest_Assets	.0529068	.0109229	4.84	0.000***	.0314982	.0743154
Experience	-2.88e+08	4.92e+08	-0.58	0.559	-1.25e+09	6.77e+08
Status	-3.04e+10	1.97e+10	-1.54	0.123	-6.90e+10	8.20e+09
Jml_Tanggungans	1.06e+10	1.58e+10	0.67	0.504	-2.04e+10	4.16e+10
Sumatera	-3.49e+09	5.91e+09	-0.59	0.555	-1.51e+10	8.10e+09
Kalimantan	-8.43e+09	3.26e+09	-2.59	0.010***	-1.48e+10	-2.05e+09
Sulawesidan~u	-2.61e+09	4.34e+09	-0.60	0.547	-1.11e+10	5.89e+09
PulauLainnya	-4.64e+09	1.28e+09	-3.62	0.000***	-7.15e+09	-2.13e+09
_cons	5.40e+10	2.31e+10	2.34	0.019**	8.78e+09	9.93e+10

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

5. KESIMPULAN

Penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan usaha Direktorat Jenderal Pajak yang berkesinambungan dan sangat penting untuk mencapai target penerimaan nasional. Salah satu yang menjadi fokus utama penggalian pajak Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sektor HWI. Hal ini dikarenakan besarnya potensi yang dimiliki Wajib Pajak HWI sebagai sektor penyumbang utama penerimaan pajak orang pribadi.

Kondisi penerimaan pajak dari sektor Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia saat ini masih belum optimal. *Tax gap* untuk sektor ini pun masih relatif besar, yaitu sekitar 41,74% (Sakernas & IO, 2018). Hal ini menandakan masih terbukanya peluang besar untuk penggalian pajak di sektor ini. Dengan demikian, diperlukan suatu alat atau metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam menentukan

sasaran analisis Wajib Pajak HWI, sehingga upaya penggalian potensi pajak untuk sektor ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran.

Analisis pengaruh *investable assets* terhadap penghasilan Wajib Pajak HWI ini dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam menyeleksi Wajib Pajak HWI yang akan dilakukan analisis. Dengan menggunakan data panel yang bersumber dari 2.850 SPT Tahunan HWI pada periode 2017 dan 2018, analisis ini menemukan bahwa *investable assets* secara statistik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghasilan Wajib Pajak HWI. Setiap 100 persen kenaikan *investable assets* yang dimiliki oleh HWI akan meningkatkan penghasilan HWI sebesar 5,3 persen. Berdasarkan hasil regresi tersebut, sasaran analisis terhadap Wajib Pajak HWI dapat difokuskan kepada para Wajib Pajak HWI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $\frac{\text{kenaikan penghasilan}}{\text{kenaikan investable assets}} \geq 5.3\% \rightarrow$ tidak termasuk ke dalam sasaran analisis
- Jika $\frac{\text{kenaikan penghasilan}}{\text{kenaikan investable assets}} < 5.3\% \rightarrow$ termasuk ke dalam sasaran analisis

6. KETERBATASAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN LEBIH LANJUT

6.1 Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam analisis pengaruh *investable assets* terhadap penghasilan Wajib Pajak HWI di antaranya:

- a. Masih terdapat variabel-variabel independen lain yang memengaruhi penghasilan HWI, tetapi tidak dimasukkan ke dalam model regresi dikarenakan keterbatasan data, misalnya variabel jumlah konsumsi, tingkat pendidikan Wajib Pajak HWI, dan lain-lain.
- b. Data yang digunakan dalam analisis adalah data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak HWI pada SPT Tahunan, sehingga validitas hasil regresi sangat bergantung kepada tingkat kebenaran jumlah harta dan penghasilan yang dilaporkan pada SPT Tahunan.
- c. *Output* dari regresi ini tidak dapat digunakan secara langsung untuk menghasilkan potensi pajak, melainkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan sasaran analisis Wajib Pajak HWI.

6.2 Rekomendasi Penelitian Lebih Lanjut

Keterbatasan penelitian di atas membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang dengan beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- a. Menambahkan variabel-variabel penelitian lainnya ke dalam model regresi, seperti variabel jumlah konsumsi, tingkat pendidikan Wajib Pajak HWI, dan lain-lain.
- b. Memperdalam kategori lokasi geografis dengan melibatkan data Wajib Pajak HWI skala besar, sedang, dan kecil;
- c. Menggunakan pengukuran tahun data yang lebih panjang (menambahkan data sebelum 2017 dan sesudah 2018); dan
- d. Menggunakan data sampel berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdapat dalam SPT dan dapat juga dipadukan dengan data primer seperti *survey* kuesioner dan *interview in depth* dengan Wajib Pajak HWI.

Penghargaan

Saya ucapkan terima kasih kepada Harry Patria, M. Iqbal, dan Nur Fadlilah Kurniawan atas bantuan dalam penulisan dan

penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Campbell, J. Y. (2006). Household finance. *The Journal of Finance*, 61(4), 1553-1604. <https://doi.org/10.1257/000282802760015775>
- [2] Capgemini. (2017). Asia-Pacific wealth report 2017. <https://www.capgemini.com/service/asia-pacific-wealth-report-2017/>
- [3] Capgemini. (2019). World Wealth Report 2019. <https://worldwealthreport.com/resources/world-wealth-report-2019/>
- [4] Davis, S. J., & Willen, P. (2000). Using financial assets to hedge labor income risks: Estimating the benefits. Working Paper, University of Chicago.
- [5] Dougherty, C. (2006). The marriage earnings premium as a distributed fixed effect. *Journal of Human Resources*, 41(2), 433-443. <https://www.jstor.org/stable/40057282>
- [6] Evans (1996). Pearson's Correlation. <http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf>.
- [7] Flavin, M., & Yamashita, T. (2002). Owner-occupied housing and the composition of the household portfolio. *The American Economic Review*, 92(1), 342-362. <https://doi.org/10.1257/000282802760015775>
- [8] Frank, R. (2015, April 9). Where the rich make their income. CNBC. <https://www.cnbc.com/2015/04/09/where-the-rich-make-their-income.html>
- [9] Gallup, J. L., Sachs, J. D., & Mellinger, A. D. (1999). Geography and economic development. *International Regional Science Review*, 22(2), 179-232. <https://doi.org/10.1177%2F016001799761012334>
- [10] Havrilová, A. (2016). The effect of family size on men and women wellbeing. [Master's theses, Univerzita Karlova]. Digital Repository. <http://hdl.handle.net/20.500.11956/75818>
- [11] Hsiao, C. (2005). Why panel data?. *The Singapore Economic Review*, 50(2), 143-154. <https://doi.org/10.1142/S0217590805001937>
- [12] Korenman, S., & Neumark, D. (1991). Does marriage really make men more productive?. *Journal of Human Resources*, 26(2), 282-307. <https://doi.org/10.2307/145924>
- [13] Lindsey, D., & Shlonsky, A. (2008). Closing reflections: Future research directions and a new paradigm. *Child Welfare Research: Advances for Policy and Practice*, 375-378. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195304961.003.0023>
- [14] Madalozzo, R. (2008). An analysis of income differentials by marital status. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, 38(2), 267-292. <https://doi.org/10.1590/S0101-41612008000200003>
- [15] Mayoux, L. (2001). Tackling the downside: Social capital, women's empowerment and micro-finance in Cameroon. *Development and Change*, 32 (3), 435-464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00212>
- [16] My Money Wizard (2018). 18 Income Producing Assets to Generate Serious Passive Income. <https://mymoneywizard.com/income-producing-assets/>
- [17] Nakagawa, S., & Shimizu, T. (2000). Portfolio selection of financial assets by Japan's households. Bank of Japan, research papers. https://www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2000/ron0009a.htm/
- [18] OECD. (2019). Revenue Statistics 2019: Tax Revenue Trends in the OECD. <https://www.oecd.org/economy/revenue-statistics-2522770x.htm>
- [19] Okoshi, K., Nomura, K., Taka, F., Fukami, K., Tomizawa, Y., Kinoshita, K., & Tominaga, R. (2016). Suturing the gender gap: Income, marriage, and parenthood among Japanese aurgeons. *Surgery*, 159(5), 1249-1259. <https://doi.org/10.1016/j.surg.2015.12.020>
- [20] Sahn, D. E., & Alderman, H. (1988). The effects of human capital on wages, and the determinants of labor supply in a developing

country. *Journal of Development Economics*, 29(2), 157-183. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(88\)90033-8](https://doi.org/10.1016/0304-3878(88)90033-8)

- [21] Wealth-X (2019). *Global HNW Analysis: The High Net Worth Handbook*. <https://www.wealthx.com/report/high-net-worth-handbook-2019/>.
- [22] Winters, P., Davis, B., Carletto, G., Covarrubias, K., Quiñones, E. J., Zezza, A., Azzarri, C., & Stamoulis, K. (2009). Assets, activities and rural income generation: Evidence from a multicountry analysis. *World Development*, 37(9), 1435-1452. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.01.010>